

LAPORAN KINERJA



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

Jl. Widana Tahir Hasan Komplek Perkantoran Pemda KM. 02 Blambangan Umpu, Way Kanan
Telp./Whatsapp: 085813676208 Kode Pos : 34711
Website: www.waykanankab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian strategis Tahun Anggaran 2023. LKJIP ini merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan LKJIP ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah telah memiliki acuan kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. Dalam renstra telah dituangkan target-target kinerja yang harus dicapai secara periodik. Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam mengelola Pendapatan Daerah.

LKJIP ini memuat analisis dan evaluasi objektif kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, 18 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**



Drs. Nuryadin Ali Mustofa, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	4
1.4 Sistematika Laporan.....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	9
2.2 Isu Strategis Bapenda.....	11
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	13
2.5 Perjanjian Kinerja.....	14
2.6 Rencana Kinerja Tahunan.....	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Pengukuran Kinerja	29
3.1.1 Capaian Kinerja Bapenda.....	32
3.1.2 Capaian kinerja Bapenda terhadap Pendapatan Dana Transfer (DBH)	45
3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Hambatan.....	47
3.3 Akuntabilitas Anggaran.....	50
BAB IV : PENUTUP	65

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan nomor 31 tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 bertujuan untuk mencapai tugas pokok dan fungsi Bapenda, yang secara operasional, dituangkan dalam penetapan tujuan dan sasaran. Pertanggungjawaban atas capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan realisasi dari seluruh aktivitas program yang merupakan pelaksanaan kegiatan tahun 2023, yang dapat dilihat dan diukur dengan capaian dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan arah dan tolak ukur pembangunan dibidang pendapatan daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan 3 program, 10 kegiatan, dan 39 sub kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran utama Bapenda, yaitu:

a. Tujuan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas SAKIP Bapenda
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan rencana kegiatan dan program tahun 2023 yang tertuang dalam Realisasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah secara umum telah tercapai

sesuai dengan perencanaan dan pada tahap selanjutnya ada beberapa kategori pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dengan sasaran meningkatkan kualitas SAKIP telah tercapai dengan skor 68,81 (B), atau mengalami peningkatan sebesar 16,89 point dari tahun sebelumnya 51,92.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dengan capaian sebagai berikut:
 - a. PAD dengan capaian kinerja/realisasi sebesar 97,07%
 - b. Pajak Daerah terealisasi sebesar 105,14%
 - c. Retribusi Daerah terealisasi sebesar 105,32%
 - d. Pengelolaan kekayaan daerah (Deviden) terealisasi 104,54%

Dengan data capaian ini, menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah diantaranya adalah:

- Peningkatan target pada pendapatan “Lain-lain PAD yang sah”, belum mencapai 100%, hal ini karena melibatkan beberapa SKPD teknis yang memiliki target pajak atau retribusi daerah.
- Data wajib pajak daerah yang telah tidak sesuai/ kurang akurat
- Keengganan sebagian masyarakat membayar pajak dan kebocoran uang setoran pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa hal telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan SKPD yang memiliki target pendapatan “Lain-lain PAD yang sah” agar PAD meningkat dan target tercapai 100%, melakukan pemutakhiran data wajib pajak daerah dan memperluas kanal pembayaran pajak digital untuk memudahkan masyarakat membayar pajak serta menghindari kebocoran uang setoran pajak.

Melalui berbagai upaya perbaikan yang dilakukan ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk terus

meningkatkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good government) merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan sebagai bentuk tolak ukur kinerja pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi baik, bersih dan berwibawa yaitu adanya pertanggungjawaban dari setiap penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan otoritas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidangnya meliputi pertanggungjawaban dari aspek keuangan dan fisik serta manfaatnya bagi masyarakat dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Sebagai dasar hukum dalam rangka pertanggungjawaban dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kotamadya diwajibkan menyampaikan LKJIP sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan Pasal 2 , bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

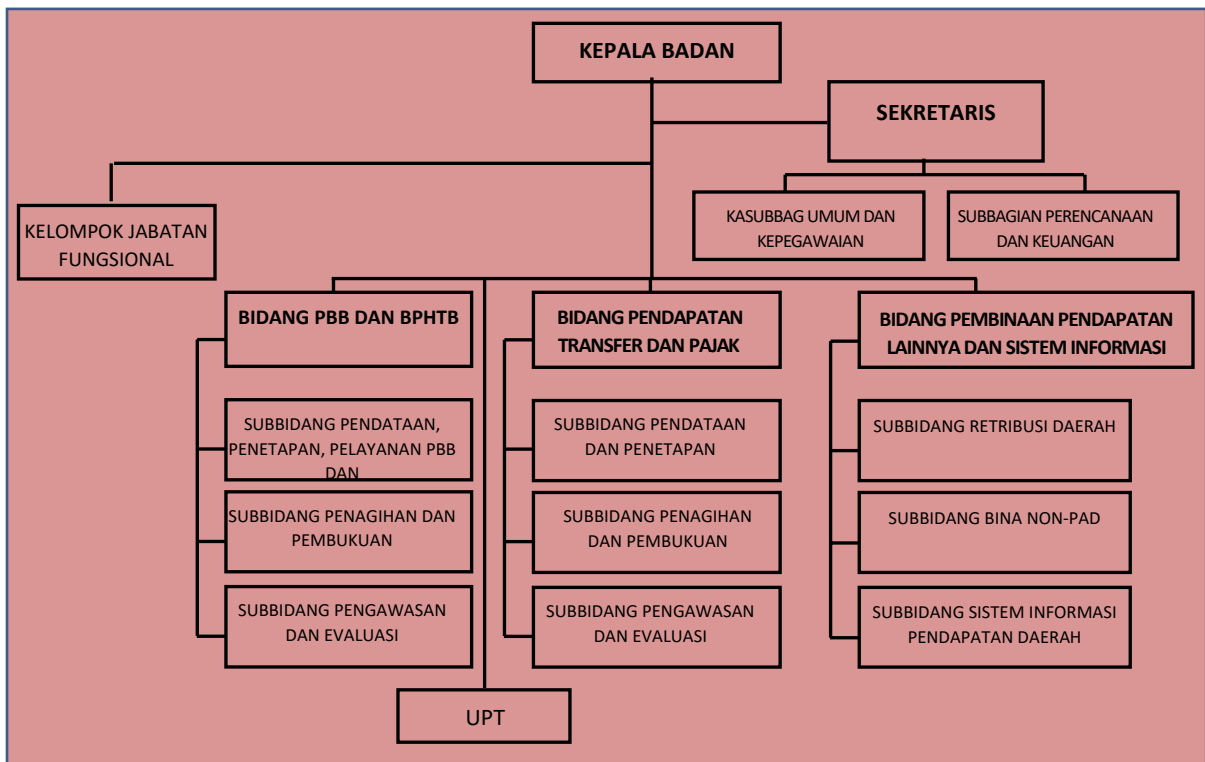
Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun Strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 1.2 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - 3.1 Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB:
 - 3.2 Subbidang Penagihan dan Pembukuan: dan
 - 3.3 Subbidang Pengawasan dan Evaluasi
4. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, terdiri dari:
 - 4.1 Subbidang Pendataan, Penetapan;
 - 4.2 Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
 - 4.3 Subbidang Pengawasan dan Evaluasi
5. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan, terdiri dari :
 - 5.1 Subbidang Retribusi Daerah;
 - 5.2 Subbidang Bina Non PAD; dan
 - 5.3 Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :
 - 6.1. UPT Pendapatan Wilayah I (Kec. Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, Negeri Agung dan Way Tuba);
 - 6.2. UPT Pendapatan Wilayah II (Kec. Banjit, Kasui dan Rebang Tangkas);
 - 6.3. UPT Pendapatan Wilayah III (Kec. Pakuan Ratu, Negara Batin, dan Negeri Besar);
 - 6.4. UPT Pendapatan Wilayah IV (Kec. Baradatu dan Gunung Labuhan);

6.5. UPT Pendapatan Wilayah V (Kec. Bumi Agung, Buay Bahuga dan Bahuga);

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 sebagai berikut:



1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah berjumlah 73 orang, sebagaimana ditampilkan dalam diagram berikut:

No	Pegawai	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	Aparatur Sipil Negara	58	
2.	Honorer/PTHLS	15	
JUMLAH		73	

a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Dari 58 orang Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, formasi pejabat struktural yang harus diisi adalah sebanyak 18 (delapan belas) formasi dan 8 (delapan) formasi Pejabat Fungsional. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

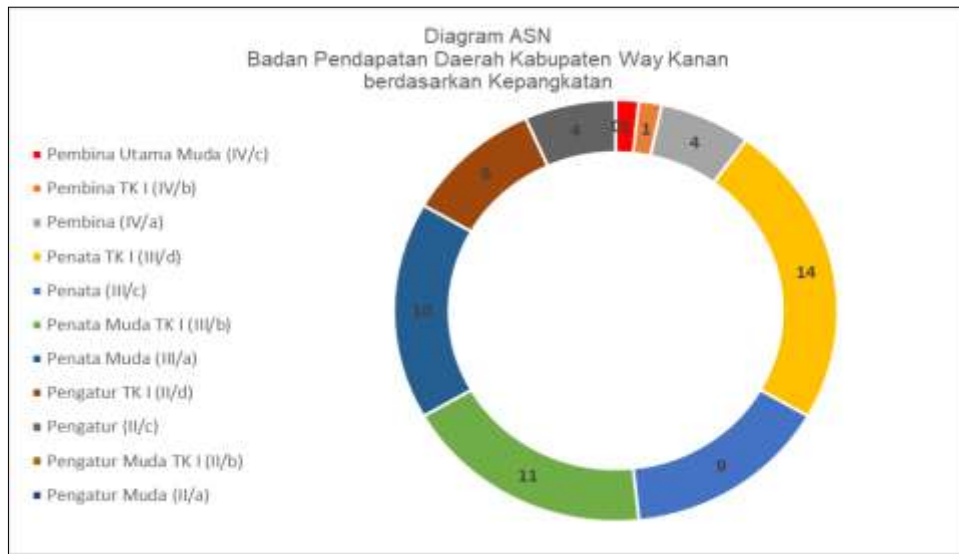
Berikut ini tabel yang menggambarkan jumlah pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

No	Nama Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Badan	1	1	
2.	Sekretaris Badan	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	3	
4.	Pejabat Fungsional	8	8	
5.	Kepala Subbag/Subbid	3	3	
6.	Kepala UPT	5	5	
7.	Kepala Subbag TU UPT	5	5	
8.	Pelaksana	32	32	
JUMLAH		58	58	

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Golongan Ruang ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan didominasi oleh Golongan III sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut ini

Diagram 1.3.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Gol Tahun 2023

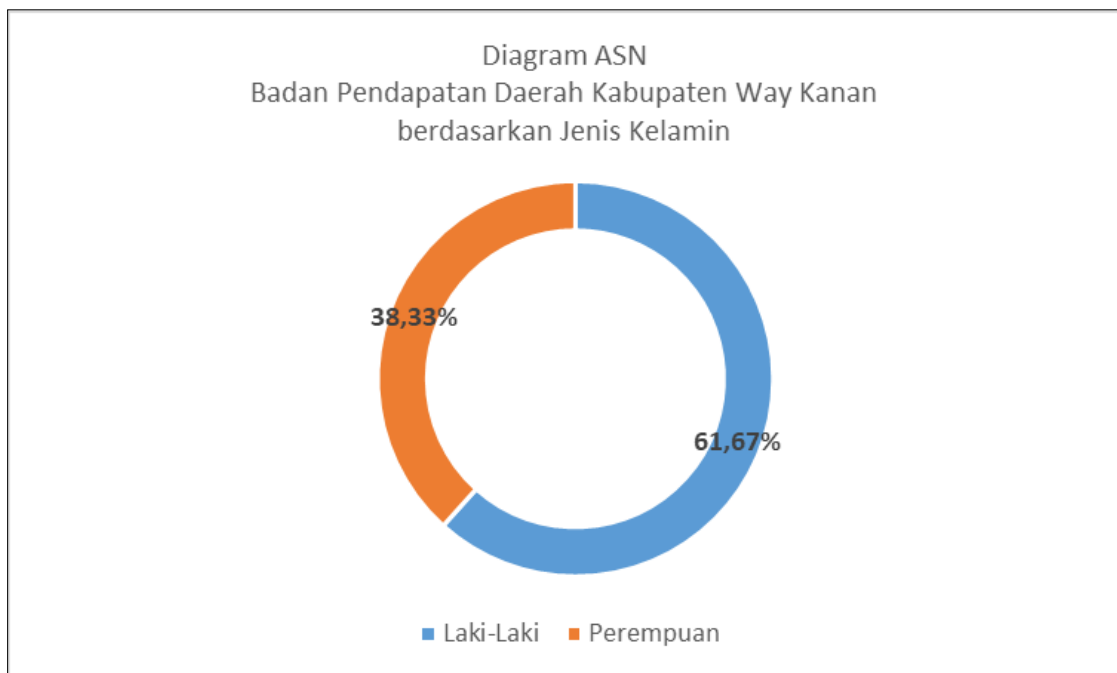


Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab. Way Kanan Th.2023

Dari diagram 2.1 tersebut tergambar bahwa jumlah PNS/ASN dengan pangkat/golongan terbanyak adalah Pangkat/Golongan Ruang Penata TK I (III/d) dengan jumlah ASN sebanyak 14 orang atau sebesar 23,33%. Sedangkan jumlah ASN dengan pangkat/golongan paling sedikit adalah Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) dengan jumlah ASN sebanyak 0 orang atau 0 %

No	Rumpun Pendidikan	ASN	Honorer	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ekonomi	31	-	
2.	Dokter Hewan	1	-	
3.	Hukum	5	1	
4.	Ilmu Pendidikan	3	3	
5.	Pertanian	2	-	
6.	Sosial	3	-	
7.	Komputer	4	2	
8.	SMA IPA/IPS	7	8	
	Jumlah	60	14	

Diagram 2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Selanjutnya dapat dilihat pada diagram 2.2, memperlihatkan bahwa Jumlah ASN Laki-laki di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan lebih banyak dari Jumlah ASN Perempuan yaitu 61,67% berbanding 38,33%.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang sudah di review sesuai dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2023 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan data analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja,

Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan adalah :

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Way Kanan ditetapkan Empat Misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Badan Pendapatan Daerah berkontribusi penuh mendukung dan melaksanakan misi ke-1 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**. Dibawah ini disajikan keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Sakip Bapenda	Nilai Evaluasi Sakip Badan Pendapatan Daerah
2		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1.2 Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan permasalahan utama yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Isu strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal.
2. Peningkatan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang tepat waktu.
3. Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Way Kanan.
4. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang tidak tepat waktu.
5. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan pelayanan perpajakan.
6. Perlu pengembangan inovasi daerah.
7. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan menyusun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Visi		: Terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera	
Misi Ke-1		: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Meningkatkan Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Melakukan Koordinasi dan

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 7. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah 4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan 5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan 7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas	1. Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah 2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien 3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang Perpajakan 5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak 6. Pelaksanaan bulan panutan dan Pajak Award 7. Peningkatan Peran PPNS (Penegak Perda) dibidang pendapatan 8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak

		8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan 9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	daerah 9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah 10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 11. Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan 12. Membuka kerjasama dengan semua <i>e-comerc, merchant</i> dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui Q-RIS 13. Peningkatan Sistem Informasi Daerah online berbasis android
--	--	--	--

1.4 Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Badan Pendapatan Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan 2021 - 2026 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Satuan	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN WAY KANAN	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP BAPENDA	Nilai Evaluasi SAKIP BAPENDA	Poin	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71
2.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4	5	6	7	7	7

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah memberikan pedoman bagi perumusan acuan terhadap ukuran kinerja dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021 - 2026.

1.5 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Way Kanan maka ditetapkan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, MM
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jabatan : KABUPATEN WAY KANAN
Eselonering : II/b
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BAPENDA	Point	57,71
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	6

Program

Anggaran

1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.449.770.243
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 7.645.800
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	<u>Rp. 1.634.850.050</u>
		Rp 10.092.266.093

1.6 Rencana Kinerja Tahunan

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah membidangi urusan keuangan untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan rencana capaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disajikan dalam bentuk tabel sistematis sebagai berikut:

Tabel 5. Sistematis Program dan Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1

Dokumen Rencana kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dokumen rencana kinerja tahunan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023

Sasaran Strategis				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian	Satuan						
				Urusan Penunjang					
				Keuangan					Rp10.092.266.093
Meningkatnya Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	57,71	Poin	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp8.449.770.243
				A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp45.000.650
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Rp9.999.700

						2. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp4.999.750
						3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp9.999.700
						4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp20.001.500
					B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp7.065.401.211

						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	Rp6.914.551.761
						2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp125.850.000
						3. Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp16.999.700
						4. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp4.999.900

						5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Rp2.999.850
					C. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp57.752.600
						1. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp19.508.400
						2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Rp24.186.000
						3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Rp14.058.200

					D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp20.000.000
					1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Rp20.000.000
					E. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp695.453.782
					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp42.189.000
					2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp123.150.000

						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp25.720.700
						4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp122.418.532
						5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp49.000.000
						6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp251.600.000
						7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp81.375.550

					F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp46.365.000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Rp21.865.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp24.500.000
					F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp254.397.000

						1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp143.180.000
						2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp111.217.000
					G. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	Rp265.400.000
						1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Rp50.000.000
						2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp150.000.000

						3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	Rp65.400.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6	Persen	2. Progam Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Peningkatan PAD	6%	Rp7.645.800
					A. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Peningkatan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94,45 Milyar	Rp7.645.800
						1. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp7.645.800
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6	Persen	3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Peningkatan PAD	6%	Rp1.634.850.050
					A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	6%	Rp1.634.850.050

						1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp129.640.000
						2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Rp110.602.000
						3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Rp89.956.000
						4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Rp164.012.200

						5. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	Rp331.252.050
						6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	Rp196.666.050
						7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Dokumen	Rp45.307.900
						8. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	Rp420.615.950
						9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	Rp10.000.000

						10. Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Rp76.957.200
						11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Rp59.840.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara hamparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, Badan Pendapatan Daerah melakukan perbaikan dan menindaklanjuti terhadap rekomendasi LHE SAKIP Bapenda tahun 2022, yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah tetap mempertahankan pemenuhan kelengkapan dokumen yaitu dokumen perencanaan, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan kinerja dan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan senantiasa berpedoman pada Juknis penyusunan dan ketepatan waktu penyusunan/ pelaporan masing-masing dokumen, baik dokumen Renstra, dokumen Rencana Kerja, dokumen Renca Kinerja Tahunan, dokumen Rencana Aksi, dokumen Pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan Kinerja dan dokumen Evaluasi Internal sesuai dengan juknis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi mulai dari perencanaan, pengukuran dan pelaporan secara berjenjang dan terjadwal Bulanan dan Triwulanan dengan melibatkan seluruh jajaran yang dipimpin oleh kepala unit/bidang dengan melampirkan bukti atau dokumen hasil monitoring dan

evaluasi dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pada waktu yang ditetapkan

3. Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Dokumen Laporan Kinerja dan telah direviu oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 17 Januari 2024 dengan melaksanakan Rapat Internal membahas tentang Pelaporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Bupati Way Kanan.
4. Badan Pendapatan Daerah telah menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi (aplikasi) dan telah meng upload mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Aplikasi E-Sakip Way Kanan.
5. Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 pada bulan Januari tahun 2024 dengan memberikan informasi capaian dan target secara jelas dan lugas serta menginfokan bila terdapat upaya perbaikan dan penyempurnaan dokumen terkait efektivitas, efisiensi dan peningkatan capaian kinerja.

Dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE SAKIP Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah kedepannya.

Laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan yang menghasilkan kinerja yang baik pada tahun anggaran 2023.

Metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu dengan menggunakan sistem indikator berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan program dan kegiatan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan hasil dengan realisasi Indikator sasaran. Pencapaian kinerja program

kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator kinerja kegiatan yang terdiri input, output, outcome. Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Indikator input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, Indikator input ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan
- b. Kelompok indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Kelompok indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, hasil menunjukkan ukuran seberapa jauh setiap produkjasa dapat memenuhi kebutuhan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target sebuah kegiatan berdasarkan indikator masukan dan keluaran. Sedangkan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan target dan realisasi berdasarkan indikator output dan outcome.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, untuk sebuah kegiatan yang kondisinya jika semakin tinggi angka realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\sum \text{PAD Tahun } n - \sum \text{PAD Tahun } n - 1}{\sum \text{PAD Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Sumber : IKU Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Setelah memperoleh angka capaian maka dilakukan analisis dan evaluasi. Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan, tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian suatu sasaran/kegiatan, dinilai dan dipelajari guna perbaikan lebih lanjut.

3.1.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada RPJMD maka sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh 3 Program utama dengan 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021- 2026 bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah adalah Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Target Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2023 di tetapkan sebagai berikut:

1. Target Kinerja Sasaran untuk Meningkatnya Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah sebesar 57,71 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh satu), sedangkan
2. Target Kinerja Sasaran untuk Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 6 % (enam persen).

Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

disajikan dalam tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Penerimaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	81.405.102.578,00	79.021.759.545,75
2	Penerimaan Pendapatan Transfer dari Daerah	Rupiah	94.445.084.861,00	74.316.224.248,00

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 8

Tabel 8. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Nilai SAKIP Bapenda	Poin	57,71	B
2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	6	2,35

Analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Nilai Sakip merupakan nilai evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun komponen Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten telah menyusun dan melaporkan Kinerja SKPD ke Inspektorat Kabupaten Way Kanan untuk mendapatkan review.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan sasaran meningkatkan kualitas SAKIP Bapenda dengan skor 68,81 (B), atau mengalami peningkatan sebesar 16,89 point dari tahun sebelumnya 51,92.

2. Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Analisis capaian sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah didukung oleh indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2023 realisasi pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 79.021.759.545,75 dari target APBD Tahun 2023 Rp. 81.405.102.578,00.

Data realisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan penghitungan untuk mengetahui efisiensi kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\sum \text{PAD Tahun 2023} - \sum \text{PAD Tahun 2022}}{\sum \text{PAD Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{79.021.759.545,75 - 77.207.443.440,44}{77.207.443.440,44} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = 2,35\%$$

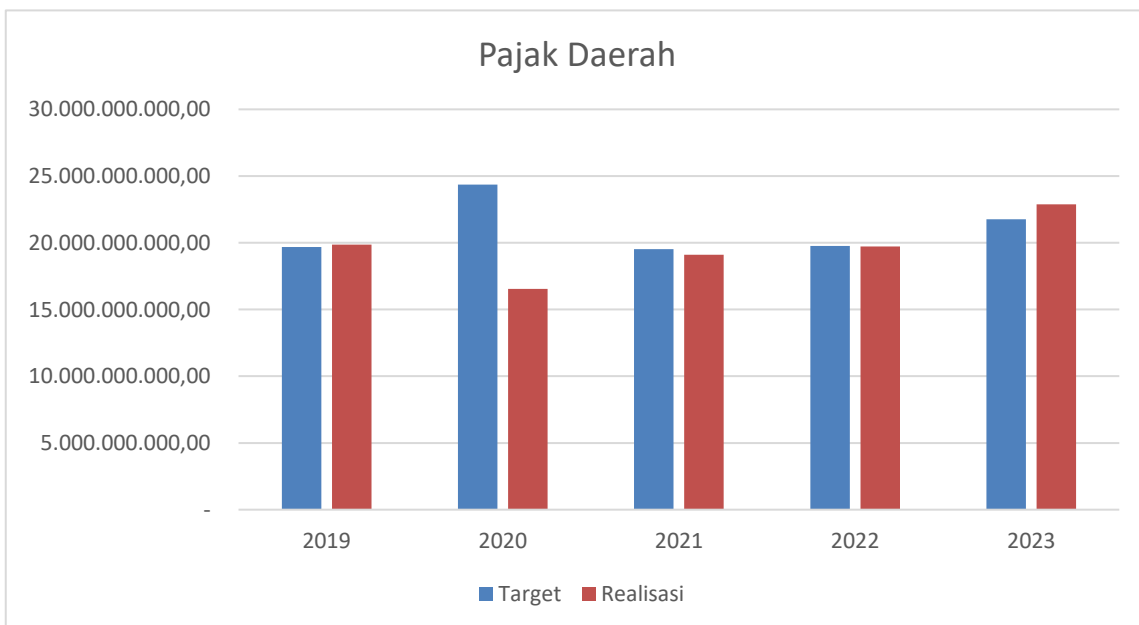
Berdasarkan hasil penghitungan persentase capaian PAD dihasilkan bahwa capaian peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebesar 2,35% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022. Namun demikian penetapan target penerimaan pajak daerah yang merupakan tupoksi Badan Pendapatan Daerah telah dinaikkan sebesar 10,13% atau kenaikannya sebesar Rp. 2.002.000.000,- dari tahun sebelumnya yaitu target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.755.000.000,- dan dinaikkan targetnya sebesar Rp. 21.757.000.000,- pada tahun anggaran 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 – 2023



Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 - Tahun 2023



Dari diagram di atas bisa dijelaskan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan selama kurun 5 tahun. Meskipun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, namun capaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 telah melampaui target yaitu 105,14% dari target APBD yang telah ditetapkan. Dan untuk Pajak Daerah telah ditetapkan kenaikan target sebesar 10,13 % (persen). Hal ini disebabkan kondisi perekonomian dan masyarakat yang

sudah mulai membaik dan tumbuh kembali pasca dampak Covid sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.

Secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 kabupaten Way Kanan maupun dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan. Dengan demikian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan sudah baik dan kedepannya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan akan lebih meningkatkan lagi Kualitas Pelayanan, Mengembangkan Inovasi dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pencapaian kinerjanya, Badan Pendapatan Daerah terbagi ke dalam Bidang-bidang yang menangani secara khusus sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan:

3.1.1.a Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan PBB dan BPHTB;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan wajib pajak bumi bangunan;

- d. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap aparaturnya pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, Kantor Urusan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP); dan
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Adapun target dan capaian kinerja bidang PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 2 (Dua) capaian, yaitu Capaian PBB dan Capaian BPHTB dengan target 6%. Untuk Capaian PBB dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian PBB} = \frac{\sum \text{PBB Tahun 2023} - \sum \text{PBB Tahun 2022}}{\sum \text{PBB Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PBB} = \frac{7.730.703.148,44 - 5.793.632.365,98}{5.793.632.365,98} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PBB} = 33 \%$$

Sedangkan Capaian BPHTB dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian BPHTB} = \frac{\sum \text{BPHTB Tahun 2023} - \sum \text{BPHTB Tahun 2022}}{\sum \text{BPHTB Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian BPHTB} = \frac{651.038.002,00 - 368.368.032,00}{368.368.032,00} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian BPHTB} = 77 \%$$

3.1.1.b Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya

Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan transfer dan pajak lainnya dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan lainnya;
- c. perumusan kebijakan teknis pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- d. penggalian sumber pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan penetapan dan pencetakan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi penetapan dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- g. pelaksanaan koordinasi, verifikasi dan validasi pendapatan daerah lainnya yang dilakukan SKPD-SKPD dan pihak terkait lainnya;
- h. pelaksanaan penagihan dan pencatatan pelunasan pendapatan lainnya;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut pendapatan lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Adapun target dan capaian kinerja bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 2 capaian, yaitu Capaian Pajak Lainnya (7 Jenis Pajak Daerah) dan Capaian Pendapatan Transfer (Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi) dengan target 6%.

Untuk Capaian Pajak Lainnya (7 Jenis Pajak Daerah) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Capaian Pajak Lainnya} = \\
 & \frac{\sum \text{Pajak Lainnya Tahun 2023} - \sum \text{Pajak Lainnya Tahun 2022}}{\sum \text{Pajak Lainnya Tahun 2022}} \times 100\% \\
 & \text{Persentase Capaian Pajak Lainnya} = \frac{14.493.956.507,70 - 13.555.225.697,86}{13.555.225.697,86} \times 100\% \\
 & \text{Persentase Capaian Pajak Lainnya} = 7\%
 \end{aligned}$$

Untuk capaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian DBH} = \frac{\sum \text{DBH Tahun 2023} - \sum \text{DBH Tahun 2022}}{\sum \text{DBH Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase DBH} = \frac{74.316.224.248,00 - 86.003.786.950,00}{86.003.786.950,00} \times 100\%$$

$$\text{Persentase DBH} = -14 \%$$

3.1.1.c Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendapatan lainnya dan sistem informasi pendapatan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan kode etik dan profesionalisme aparat pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah dan database sistem informasi pendapatan yang terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- d. penyediaan server dan infrastruktur jaringan sistem informasi;
- e. pemeliharaan dan pengamanan baik perangkat fisik dan perangkat lunak sistem database dan jaringan server;
- f. pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan para pengguna pengelola sistem informasi pendapatan;
- g. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur penyelenggaraan sistem informasi pendapatan; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adapun target dan capaian kinerja bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 2 capaian, yaitu Capaian Retribusi Daerah sebesar 5.5% dan Updating Aplikasi Simpada dengan tingkat ketercapaian 100%.

Untuk capaian Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Retribusi Daerah} = \frac{\Sigma \text{Retribusi Daerah Tahun 2023} - \Sigma \text{Retribusi Daerah Tahun 2022}}{\Sigma \text{Retribusi Daerah Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Retribusi Daerah} = \frac{2.409.262.670,00 - 2.308.149.197,43}{2.308.149.197,43} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Retribusi Daerah} = 4,38 \%$$

Sedangkan untuk Peningkatan Aplikasi Simpada (Sistem Informasi Pajak Daerah) telah dilaksanakan dengan melakukan Updating aplikasi Simpada dan telah selesai 100%.

Secara rinci dapat diuraikan Capaian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Daerah tahun 2023 terhadap Target APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah/DBH Pajak Daerah dari Propinsi Tahun 2023 terhadap Target APBD tahun 2023

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.405.102.578,00	79.021.759.545,75	97,07%
4.1.01	Pajak Daerah	21.757.000.000,00	22.875.697.658,14	105,14%
4.1.02	Retribusi Daerah	2.287.507.100,00	2.409.262.670,00	105,32%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.145.471.831,00	5.379.146.380,59	104,54%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.215.123.647,00	48.357.652.837,02	92,61%
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	94.445.084.861,00	74.316.224.248,00	78,69%

Realisasi PAD tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tercapai sebesar 97,07%. Berdasarkan Komponen Penyusun Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah telah mencapai 105,14%, realisasi Retribusi Daerah sebesar 105,32%, realisasi Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar 92,61%, Penjabaran Capaian Kinerja SKPD terhadap Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah/DBH Pajak Daerah dari Provinsi tahun 2023 disajikan dalam Tabel 10

Tabel 10. Penjabaran Capaian Kinerja OPD terhadap Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah/DBH Pajak Daerah dari Propinsi Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.405.102.578,00	79.021.759.545,75	97,07%
4.1.1	Pajak Daerah	21.757.000.000,00	22.875.697.658,14	105,14%
4.1.01.06	Pajak Hotel			
	Capaian Kinerja	22.000.000,00	23.809.490,00	108,22%
		Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2023 sesuai Target berdasarkan Realisasi sebesar 108,22% (seratus delapan persen koma dua puluh dua persen)		
	Masalah	Ketidakpatuhan pembayaran pajak setiap bulan disebabkan kurangnya kesadaran pemilik hotel sehingga target bulanan tidak sesuai progres.		
	Solusi	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kananakan melakukan pendekatan secara persuasif ke pihak hotel untuk membayar pajak sesuai dengan piutang pajak hotel.		
4.1.01.07	Pajak Restoran dan Sejenisnya	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	1.700.000.000,00	2.171.527.134,00	127,74%
		Realisasi Pajak Restoran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 127,74%, Pajak Restoran diperoleh dari Pembayaran Pajak Restoran yang disetorkan oleh : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 2. Kampung (Belanja APBK), 3. Sekolahah (TK, SD dan SMP); 4. dan beberapa Rumah Makan.		
	Masalah	Pembayaran pajak restoran dari Dana Kampung (ADD) dan Sekolah (BOSDA) yang dilakukan di akhir tahun menyebabkan terhambatnya persentase realisasi pajak daerah.		

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
	Solusi	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan melakukan penagihan piutang pajak terhadap Kampung dan UPT Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Way Kanan		
4.1.01.09	Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	225.000.000,00	206.629.855,00	91,84%
		Capaian Penerimaan Pajak Reklame sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 91,84 %. Realisasi penerimaan Pajak Reklame sebagian besar masa pajaknya di akhir tahun tidak diperpanjang (dicopot) oleh pemiliknya sehingga menyebabkan realisasi pajak reklame tidak mencapai sesuai target.		
	Masalah	sebagian besar Pajak Reklame tidak diperpanjang seperti Reklame Realme, Vivo, Samsung dan OPPO.		
	Solusi	Bapenda Way Kanan akan melakukan pencarian Objek Pajak Baru di Kabupaten Way Kanan.		
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	10.300.000.000,00	10.751.475.919,60	104,38%
		Pajak Penerangan Jalan (PLN) diperoleh dari dua sumber yaitu dari PLN dan Non PLN (Perusahaan). Pembayaran oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan dilakukan tepat waktu. Realisasi Pajak Penerangan Jalan terdiri dari Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Way Kanan dan sudah mencapai target 104 % pada tahun anggaran 2023.		
	Masalah	Sesuai Target		
	Solusi	Akan dilakukan peningkatan objek pajak baru		
4.1.01.11	Pajak Parkir	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	125.000.000,00	120.625.705,00	96,50%
		Penerimaan Pajak Parkir tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai sebesar 96,50 % .		
	Masalah	Disebabkan beberapa perusahaan seperti PT Alfaria Trijaya mengalami keterlambatan pembayaran pajak setiap bulan.		
	Solusi	Bapenda Way Kanan akan melakukan Penagihan Piutang Pajak Daerah.		
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	615.000.000,00	640.255.739,10	104,11%
		Realisasi Pajak air tanah mencapai target sebesar 104,11% karena pemakaian debit air meningkat di beberapa perusahaan sehingga realisasi pembayaran pajak air tanah sudah maksimal		
	Masalah	Pemakaian Debit air meningkat.		

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
	Solusi	Target sudah maksimal.		
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	570.000.000,00	579.632.675,00	101,69%
		Pajak MBLB Produksi dari perusahaan tambang batu sudah maksimal dikarenakan faktor pengadaan fisik proyek pemerintah sudah berjalan dan terealisasi maksimal.		
	Masalah	Telah sesuai target		
	Solusi	Bapenda Way Kanan akan melakukan pencarian Objek Paak Baru guna meningkatkan PAD dari sektor pajak Mineral bukan logam dan batuan.		
4.1.01.15	PBB P2	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	7.500.000.000,00	7.730.703.148,44	103,08%
		Realisasi PBB P2 Tahun 2023 terdiri dari penerimaan pembayaran Piutang PBB Tahun 2021 dan 2022 dan Pembayaran SPPT Massal dan Objek Pajak Baru Tahun 2023		
	Masalah	Keterlambatan pembayaran pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2022 oleh Wajib Pajak.		
	Solusi	Penegasan koordinasi dan komunikasi antara UPT Badan pendapatan Daerah sebagai perpanjangan tangan Badan pendapatan Daerah dengan pemerintah kampung, sehingga pemerintah kampung dapat menghimbau kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak PBB P2 tepat waktu dan melunasi tagihan pajak PBB P2 di tahun berikutnya.		
4.1.01.16	BPHTB-Pemindahan Hak Baru	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	700.000.000,00	651.038.002,00	93,01%
		Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penerimaan dari Transaksi BPHTB tahun 2023		
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi BPHTB tidak dapat dipastikan dikarenakan menunggu pengajuan dari wajib pajak - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rendah - Masih terdapat laporan nilai jual beli tanah yang tidak sesuai dengan sesungguhnya 		
	Solusi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di Kabupaten Way Kanan. - Akan dilakukan pembaharuan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) melalui tahapan pengumpulan NIR (Nilai Indeks Rata-Rata) dalam setiap ZNT (Zona Nilai Tanah) - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Berkas Pengajuan BPHTB terkait kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 		
4.1.02	Retribusi Daerah	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	2.287.507.100,00	2.409.262.670,00	105,32%
		Capaian realisasi retribusi daerah secara general mencapai 105,32% dan telah melampaui target. Realisasi ini merupakan akumulasi penerimaan dari 10 jenis retribusi yang capaian perjenis retribusinya sangat bervariasi. Ada 5 jenis retribusi yang capaian realisasinya mencapai/melebihi target yang ditetapkan yaitu Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tera Ulang Timbangan,		

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Persetujuan Bangunan gedung, sedangkan penerimaan 5 jenis retribusi lainnya meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Pejualan Produksi Usaha Daerah belum mencapai target yang ditetapkan.		
	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat beberapa Alat/Bangunan Milik Pemerintah Daerah sebagai sumber potensi retribusi yang mengalami Depresiasi/Penyusutan Umur Pakai sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi sumber potensi retribusi. b. Beberapa sumber potensi retribusi perlu peningkatan sarana transportasi yang memadai. c. Adanya potensi sumber retribusi yang perlu diperbaharui. 		
	Solusi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat rekonsiliasi tentang evaluasi capaian realisasi penerimaan retribusi daerah yang disetujui oleh sekretaris Daerah. - Melaksanakan monitoring pemungutan retribusi ke SKPD Pemungut Retribusi. 		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	5.145.471.831,00	5.379.146.380,59	104,54%
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD (PT Bank Lampung) dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Realisasi Tahun 2022 adalah 100,00%, pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BMUD telah sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani.		
	Masalah	-		
	Solusi	-		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	52.215.123.647,00	48.357.652.837,02	92,61%
		Capaian Lain-lain PAD yang Sah mencapai 92,61% . Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah telah mencapai hasil maksimal.		
	Masalah	Beberapa jumlah angkutan yang telah masuk daftar lelang tidak ditebus oleh peserta pemenang lelang.		
	Solusi	Melakukan koordinasi dengan Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)		
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Target	Realisasi	%
	Capaian Kinerja	94.445.084.861,00	74.316.224.248,00	78,69%
		Capaian realisasi pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Pendapatan Transfer Kurang bayar Triwulan III dan IV tahun 2023 b. Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - DBH Pajak Kendaraan Bermotor TW I - DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TW I dan TW II 		

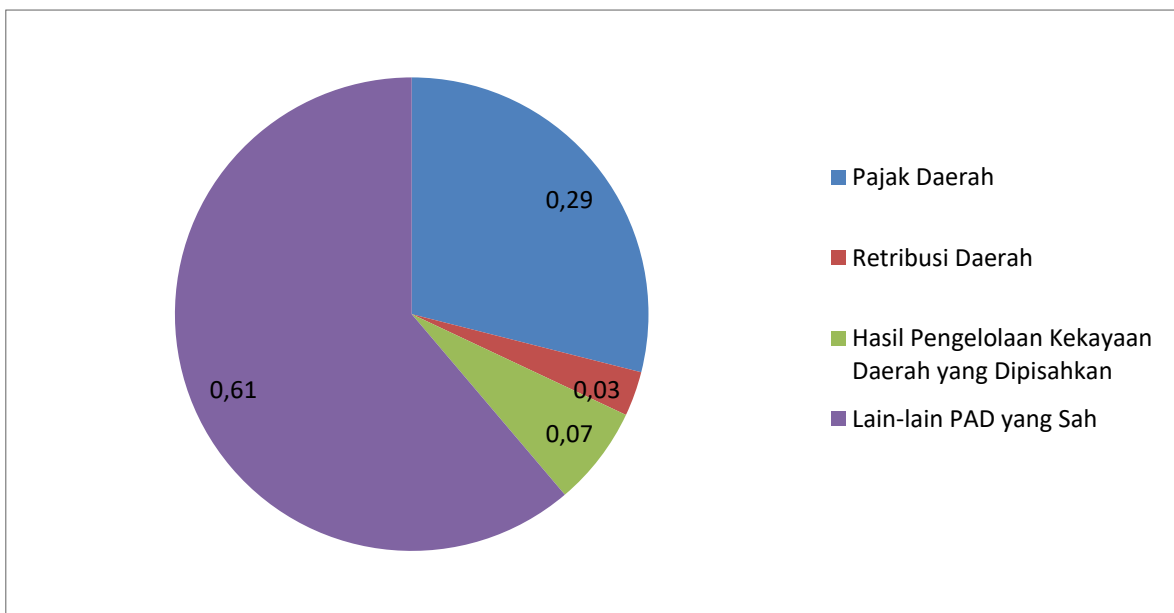
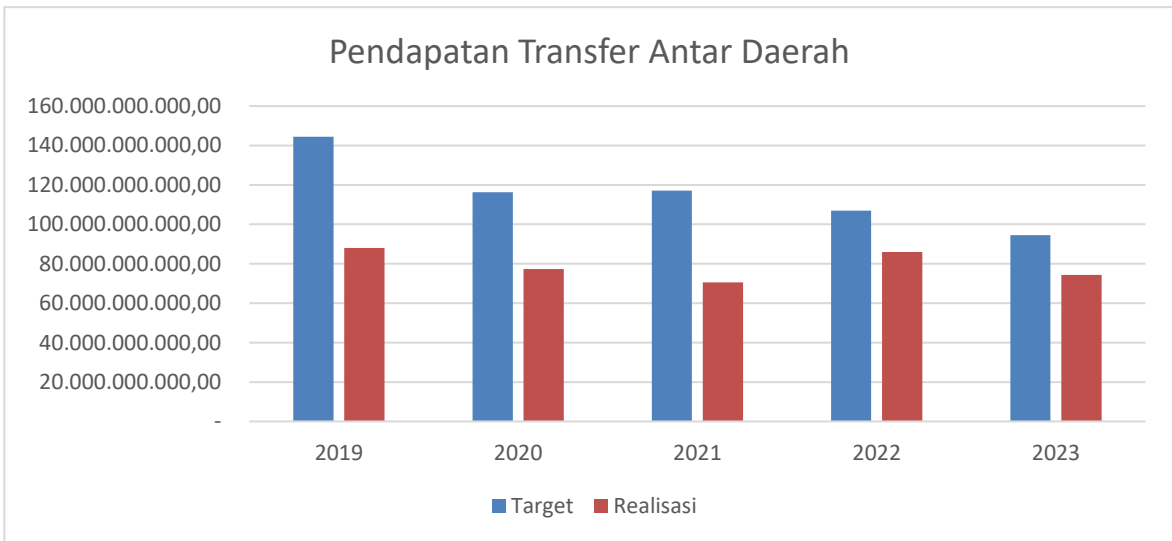
Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
		<ul style="list-style-type: none"> - DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW I dan TW II - DBH Pajak Air Permukaan TW I dan TW II - DBH Pajak Rokok TW I, TW II dan TW III 		
	Masalah	Masih ada Keterlambatan Transfer Pendapatan Transfer Antar Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan untuk periode TW III dan TW IV Tahun 2023		
	Solusi	Rekonsiliasi berkala dengan Badan Pendapatan Propinsi terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah/Dana Bagi Hasil Pendapatan dari Propinsi.		

3.1.2 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Dana Transfer antar Daerah (DBH)

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota merupakan satu sub kegiatan dalam Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Sub Kegiatan ini menjadi salah satu sasaran pendukung Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Sasaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu meningkatkan Fiskal Daerah untuk mewujudkan misi Kabupaten Way Kanan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Realisasi Pendapatan Transfer antar daerah tahun 2023 mencapai Rp. 74.316.224.248,00 dari target APBD tahun 2023 Rp. 94.445.084.861,00. Penerimaan Realisasi Pendapatan Transfer dari Daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.687.562.702,00 dari Relisasi tahun 2022 Rp. 86.003.786.950,00. Adapun realisasi Pendapatan Transfer dari Daerah selama kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

Realiasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019 - 2023



3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Hambatan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tergalai secara optimal telah dilaksanakan pendataan objek pajak baru (OPB) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hasil koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan meminta data PTSL tahun 2023 dari BPN atas OPB yang telah terbit sertifikat tanahnya oleh BPN dengan tidak mensyaratkan pembayaran PBB pada proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil koordinasi tersebut telah diterbitkan Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (OPB PBB-P2) tahun 2023 sebanyak 1.661 SPPT PBB P2 dengan nilai tagihan pajak sebesar Rp. 198.368.298.
2. Badan Pendapatan Daerah telah melakukan Pelayanan Keliling Pajak Daerah ke 15 kecamatan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan keliling ini melayani Pendaftaran Objek Pajak Baru, Pembetulan/Pembatalan Objek Pajak, dan Pembayaran Pajak. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan melibatkan Bank sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara langsung.
3. Telah dilakukan Pembentukan Tim Penilai Nilai Indeks Rata-rata (NIR) Tanah di Kabupaten Way Kanan yang akan dijadikan salah satu acuan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dan sebagai acuan dalam melaksanakan verifikasi BPHTB. Nilai Indeks Rata-rata (NIR) Tanah akan disajikan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2023. Dan hasil kerjanya adalah terbentuknya penyesuaian NJOP yang sudah ditandatangani Bupati Way Kanan dan berlaku untuk tahun pajak 2023.
4. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Hasil dari Provinsi. Dibandingkan dengan tahun 2022 besarnya selisih penyaluran Dana Bagi Hasil Dari Provinsi sebesar Rp. 11.687.562.702,00. Sedangkan

total penerimaan Dana Bagi Hasil dari provinsi tahun 2023 sebesar Rp. 74.316.224.248,00.

5. Dalam Pengembangan teknologi informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan pengembangan pembayaran melalui kanal digital, Pembayaran Pajak Online melalui smartphone, ATM. Pengembangan ini bekerja sama dengan pihak Bank yang dalam teknisnya pihak bank yaitu Bank Lampung, Bank BRI, BNI memperluas layanan pembayaran dengan kerja sama beberapa platform seperti pembayaran Pajak Daerah melalui Alfa, Indomaret, BRI, BNI, Kantor Pos, QRIS sehingga Badan Pendapatan Daerah mendapatkan benefit dari kerjasama tersebut.
6. Pihak Bapenda masih terus mengembangkan Inovasi Daerah yaitu Program Pena Bakti PBB-P2 dan Program Inovasi Peri Jadi Uang. Program Pena Bakti PBB-P2 merupakan Penyesuaian NJOP melalui Pembentukan Tim Penilaian PBB P2 berhasil meningkatkan penerimaan Pajak PBB P2 sebesar 103,08% tahun anggaran 2023 dan Program Inovasi Peri Jadi Uang adalah Inovasi Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan dana APBK Kampung sehingga peningkatan yang signifikan atas Penerimaan pada sektor Pajak Restoran sebesar 127,67%. Dalam rangka Anugrah Inovasi Daerah kabupaten Way Kanan tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan memperoleh predikat Juara 2 Perangkat Daerah Terinovatif tingkat kabupaten Way Kanan pada Program Pena Bakti PBB P2 dan Juara Harapan 1 pada Program Inovasi Peri Jadi Uang.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah melakukan revisi Renstra dan IKU Badan Pendapatan Daerah dengan tujuan Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hasil studi/bimtek Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan bekerja sama Fakultas Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam rangka Penguatan SAKIP Kabupaten Way Kanan. Program ini berkelanjutan pada tahun anggaran

2023 melakukan studi tiru ke pemda kabupaten Bantul, Yogyakarta dan pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan SAKIP dan Penyusunan IKU oleh Bapak Rusman R manik, M.Si dari Fakultas Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 21 s/d 25 November 2023

Hambatan yang di hadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Trend pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan di akhir tahun serta keterlambatan pembayaran pajak terhadap SKPD/SPPT yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Rendahnya tingkat pembayaran piutang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebabkan oleh perpindahan kepemilikan Objek Pajak (OP), alamat pemilik objek pajak di luar daerah kabupaten Way Kanan yang sulit ditemukan, serta adanya beberapa subjek pajak yang telah menutup usahanya (bangkrut).
3. Produksi dari perusahaan tambang batu kurang maksimal dikarenakan faktor pengadaan fisik proyek pemerintah belum terealisasi maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
4. Masih banyak Wajib Pajak BPHTB yang tidak melaporkan/mengurangi nilai transaksi yang sebenarnya sehingga penerimaan BPHTB belum maksimal.
5. Belum terlaksananya pemutakhiran data objek pajak daerah sehingga masih banyak Objek Pajak (OP) yang belum masuk dalam Data Objek Pajak Daerah atau kondisi Objek Pajak (OP) yang mengalami perubahan/perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan data Objek Pajak (OP) yang dimiliki.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebesar Rp. 10.092.266.093,00 yang keseluruhan merupakan belanja operasi. Realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai Rp. 8.877.201.303,00 atau 94% sehingga terdapat efisiensi anggaran mencapai Rp. 487.272.678,00. Secara rinci realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.449.770.243	7.972.810.230	94,36%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.650	45.000.650	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	9.999.700	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.750	4.999.750	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.700	9.999.700	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.001.500	20.001.500	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.065.401.211	6.610.014.183	93,55%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.914.551.761	6.459.164.733	93,41%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.850.000	125.850.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.999.700	16.999.700	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.999.900	4.999.900	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.999.850	2.999.850	100%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	57.752.600	55.671.700	96,40%
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	19.508.400	18.379.900	94,22%
Pengolahan Data Retribusi Daerah	24.186.000	23.346.100	96,53%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.058.200	13.945.700	99,20%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	9.559.000	47,80%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	9.559.000	47,80%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.453.782	695.192.300	99,96%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.189.000	42.189.000	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.150.000	123.150.000	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.720.700	25.713.600	99,97%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.418.532	122.418.200	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.000.000	49.000.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.600.000	251.599.500	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	81.375.550	81.122.000	99,69%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.365.000	45.305.000	97,71%

Pengadaan Mebel	21.865.000	21.850.000	99,93%
Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	24.500.000	23.455.000	95,73%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.397.000	246.685.597	96,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.180.000	135.468.597	94,61%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.217.000	111.217.000	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.400.000	265.381.800	99,99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	49.992.500	99,99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.400.000	65.389.300	99,98%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.645.800	7.645.800	100,00%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.645.800	7.645.800	100,00%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.634.850.050	1.626.371.200	99,48%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	129.640.000	128.581.700	99,18%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.602.000	110.511.000	99,92%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	89.956.000	89.067.150	99,01%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	164.012.200	162.544.000	99,10%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	331.252.050	329.809.350	99,56%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	196.666.050	195.660.750	99,49%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.307.900	44.243.250	97,65%
Penagihan Pajak Daerah	420.615.950	420.048.700	99,87%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000	9.973.500	99,74%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	76.957.200	76.461.600	99,36%

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	59.840.700	59.470.200	99,38%
	10.092.266.093	9.606.827.230	95,17%

Berikut gambaran umum capaian target Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan serapan dana sebesar Rp. 45.998.850,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 45.998.850,- dan kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan serapan dana Rp. 9.999.700,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 9.999.700,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 6 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah renja SKPD, dokumen evaluasi renja SKPD.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Dokumen RKA-SKPD dengan serapan dana Rp. 4.999.750,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 4.999.750,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA_SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan serapan dana Rp. 9.999.700,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.999.700,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan serapan dana Rp. 20.001.500,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.001.500,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serapan dana sebesar Rp. 6.608.180.368,- (95,53%) dari pagu anggaran Rp. 7.065.401.211,- dan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya tiap bulan.
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.457.330.918,- (93,39%) dari pagu anggaran Rp. 6.608.180.368,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 57 (Lima puluh tujuh) Orang ASN Bapenda yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Triwulan IV
 - b. Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan serapan anggaran 125.850.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 125.850.000,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan serapan anggaran Rp. 16.999.700,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 16.999.700,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan serapan anggaran Rp. 4.999.700,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 4.999.700,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 4 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan serapan anggaran Rp. 2.999.850,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 2.999.850,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 dokumen Dokumen Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan serapan dana Rp. 55.671.700,- (96,40%) dari pagu anggaran Rp. 57.752.600,-
 - a. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah dengan serapan anggaran Rp. 18.379.900,- (94,22%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.508.400,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah. Adapun sub kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
 - b. Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan serapan dana Rp. 23.346.100,- (96,53%) dari pagu anggaran Rp. 24.186.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 4 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
 - c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah; dengan serapan dana Rp. 13.945.700,- (99,20%) dari pagu anggaran Rp. 14.058.200,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 4 Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah. Adapun kendala yang ditemukan adalah keterlambatan Laporan Penerimaan yang disampaikan oleh Bendahara SKPD Pengelola Retribusi Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan serapan dana Rp 9.559.000,- (47,80%) dari pagu anggaran Rp. 20.000.000,-
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan serapan dana Rp 9.559.000,- (47,80%) dari pagu anggaran Rp. 20.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan 5 (Lima) Pegawai mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan serapan dana Rp. 695.192.300 (99,96%) dari pagu anggaran Rp. 695.453.782,-
- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan serapan anggaran Rp. 42.189.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 42.189.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran berupa tersedianya Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan serapan anggaran Rp. 123.150.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 123.150.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya Paket Peralatan dan perlengkapan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan serapan anggaran Rp. 25.713.600,- (99,97%) dari pagu anggaran Rp. 25.720.700,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga.
 - d. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dengan serapan anggaran Rp. 122.418.200,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 122.418.532,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan serapan anggaran Rp. 49.000.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 49.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan keluaran tersedianya paket Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan serapan anggaran Rp. 251.599.500,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 251.600.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD.

- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD dengan serapan anggaran Rp. 81.122.000,- (99,69%) dari pagu anggaran Rp. 81.375.550,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran telah tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan serapan dana 246.685.597,- (96,97%) dari pagu anggaran Rp. 254.397.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan serapan anggaran Rp. 135.468.597,- (94,61%) dari pagu anggaran Rp. 192.650.800,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan serapan anggaran Rp. 111.217.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 111.217.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 75% dengan keluaran Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan serapan dana Rp. 265.381.800,- (99,99%) dari pagu anggaran Rp. 265.400.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan serapan anggaran Rp. 49.992.500,- (99,99%) dari pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 2 (Dua) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan serapan anggaran Rp. 150.000.000,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 150.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 1 (Satu) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan serapan anggaran Rp65.389.300,- (99,98%) dari pagu anggaran Rp. 65.400.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 60 (Enam puluh) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan serapan dana Rp. 7.645.800,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 7.645.800,-
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran Rp. 7.645.800,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 7.645.800,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 74.316.224.248,00 dari target yang telah ditetapkan setahun sebesar Rp. 94.450.000.000,-

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan serapan dana Rp. 1.626.371.200,- (99,48%) dari pagu anggaran Rp. 1.634.850.050,-
 - a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 128.581.700,- (100%) dari pagu anggaran Rp. 129.640.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Dokumen Hasil Analisis

Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang masih dalam tahap proses penyusunan Perda. Dengan telah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka masing-masing daerah untuk segera merevisi turunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 1877 ayat (b) disebutkan bahwa perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 5 Januari 2022).

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan akan membuat peraturan daerah terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2024 sudah di undangan untuk dilaksanakan.

Perda tentang Pajak daerah dan retribusi daerah ini telah selesai disusun dan telah disyahkan dan selanjutnya akan disusun Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 110.511.000,- (99,92%) dari pagu anggaran Rp. 110.602.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah. Antara lain 178 Orang yang diberikan regulasi Pajak Daerah dan Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Way Kanan diantaranya bersumber dari Pajak Daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penerimaan daerah berupa kesadaran untuk memenuhi kewajiban dan membayar pajak daerah. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi mengenai pajak daerah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mendaftarkan aset (objek pajak) yang dimilikinya kepada pemerintah daerah.

Adapun kendala yang ditemui adalah Tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi. Rekomendasinya dilakukan sosialisasi perpajakan

- c. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan serapan anggaran 89.067.150 (99,01%) dari pagu anggaran Rp. 89.956.000,- dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah. Adapun sub kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
- d. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 162.544.000,- (99,10%) dari pagu anggaran Rp. 164.012.200,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah yaitu telah dilaksanakannya pemeliharaan perangkat lunak (software) dalam bentuk website pelayanan pajak daerah terpadu berbasis online yang terintegrasi dengan server pelayanan sistem perpajakan daerah kabupaten Way Kanan. Adapun kendala yang ditemui adalah dukungan perangkat keras (server) dan jaringan internet yang digunakan belum dapat mengoptimalkan fungsi Aplikasi secara optimal. Telah dilaksanakannya pemutakhiran perangkat keras (computer server) Upgrade atau penggantian perangkat ke yang lebih

tinggi.

- e. Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 329.809.350,- (99,56%) dari pagu anggaran Rp. 331.252.050,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 4 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah. Adapun Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari 7 jenis pajak daerah pada TW 1 sejumlah 751 Ketetapan dari 1.000 ketetapan target dalam 1 tahun. Sedangkan Pencetakan Massal 235.000 SPPT PBB P2 dan 1824 DHKP PBB P2 akan dilaksanakan pada TW 2.
- f. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 195.660.750,- (99,49%) dari pagu anggaran Rp. 196.666.050,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran berupa tersedianya 6 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Adapun jumlah Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB yang telah dilayani sebanyak 2219 WP dari 2500 WP target dalam 1 tahun.
- g. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 44.243.250,- (97,65%) dari pagu anggaran Rp. 45.307.900,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran 4 Dokumen jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi. Antara lain telah terlaksananya Penelitian dan verifikasi Piutang PBB P2 di seluruh kecamatan kabupaten Way Kanan.
- h. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 420.048.700,- (99,87%) dari pagu anggaran Rp. 420.615.950,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah. Antara lain jumlah ketetapan Pajak dan SPTPD yang disampaikan sebanyak 751 Ketetapan, Jumlah Pajak Daerah yang tertagih untuk 7 Jenis Pajak Daerah Rp. 10.376.601.210,-, Jumlah Pajak PBB P2

yang tertagih sebesar Rp. 7.730.703.148,44 bersumber dari penagihan piutang PBB P2 tahun sebelumnya dan Penagihan SPPT PBB P2.

- i. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 9.973.500,- (99,74%) dari pagu anggaran Rp. 10.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Pajak Lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah, Memberikan Kenyamanan kepada Wajib Pajak Daerah dan juga tentu berhubungan dengan peningkatan penerimaan Daerah. Persoalan Hari-hari ini tentang Pajak Daerah adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Daerah tentang kewajiban perpajakan, hal ini menjadi sebuah alasan mengapa kegiatan ini harus dilakukan, selain itu dengan juga memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepuasan wajib pajak Daerah juga penyelesaian atas persoalan persoalan antara Wajib Pajak dan Pengelola Pajak di bidang perpajakan sehingga pada akhirnya Wajib pajak merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam hal pelayanan pajak daerah mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pasca pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Kendala dalam sub kegiatan ini tidak ada, dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- j. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan serapan anggaran Rp. 76.461.600,- (99,36%) dari pagu anggaran Rp. 76.957.200,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah. Terdiri dari jumlah Dokumen Penatausahaan 7 Jenis Pajak Daerah sebanyak 86 Dokumen, Jumlah Objek Pajak yang dikelola dan

dikembangkan sebanyak 141 Objek Pajak, Jumlah wajib pajak yang dimonitoring dan dievaluasi untuk 7 jenis pajak daerah sebanyak 178 Wajib Pajak, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi PBB P2 dan BPHTB.

- k. Sub Kegiatan Pembinaan, dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan serapan anggaran Rp. 59.470.200,- (99,38%) dari pagu anggaran Rp. 59.840.700,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dengan keluaran tersedianya 1 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah. Dan untuk Realisasi Lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 42.851.316.264,02

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan Tahun 2023 memyajikan pencapaian kinerja terhadap Sasaran Strategis dalam kurun waktu selama satu tahun anggaran. Didalam pencapaiannya berbagai keberhasilan dan kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan, serta perkembangan tahun-tahun sebelumnya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Pencapaian indikator kinerja tersebut membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap Aparatur Negara, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat sipil. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 secara keseluruhan telah berhasil dengan capaian persentase kenaikan PAD sebesar 2,35% dari tahun sebelumnya dan capaian Penerimaan Pajak Daerah sebesar 105,14% dari target APBD yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa indikator capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum tercapai namun telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilakukan berbagai upaya Optimalisasi dan Inovasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terwujud visi dan misi kabupaten Way Kanan Unggul dan Sejahtera.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

NAMA PEJABAT : Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
JABATAN : KEPALA BADAN
ESELON : II b
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS/PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Poin	57,71
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	PAD Thn N-PAD Thn N-1 di bagi PAD Thn N-1 di kali 100%	Persen	6

No.	Program		Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.449.770.243	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	7.645.800	
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	1.634.850.050	

Blambangan Umpu, 02 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN



RADEN ADIPATI SURYA, S.H.,M.M.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

NO	TUJUAN BAPENDA	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Point	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	$KFD_{Kabupaten} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$	Point	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	RPJMD Tahun 2021-2026

		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\sum PAD Tahun n - \sum PAD Tahun n-1}{\sum PAD Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			1	Persentase Pendapatan PBB-P2	$\frac{\sum PBB Tahun n - \sum PBB Tahun n-1}{\sum PBB Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			2	Persentase Pendapatan Pajak BPHTB	$\frac{\sum BPHTB Tahun n - \sum BPHTB Tahun n-1}{\sum BPHTB Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			3	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya	$\frac{\sum Pajak Lainnya Tahun n - \sum Pajak Lainnya Tahun n-1}{\sum Pajak Lainnya Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			4	Persentase Peningkatan Pendapatan (DBH) dari Provinsi	$\frac{\sum DBH Tahun n - \sum DBH Tahun n-1}{\sum DBH Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	7	7	Laporan PAD Tahunan
			5	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\sum Retribusi Tahun n - \sum Retribusi Tahun n-1}{\sum Retribusi Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			6	Persentase Pendapatan Lain yang Sah	$\frac{\sum Pendapatan Lain yang Sah Tahun n - \sum Pendapatan Lain yang Sah Tahun n-1}{\sum Pendapatan Lain yang Sah Tahun n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,08	6,08	Laporan PAD Tahunan
			7	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi	Updating Aplikasi Simpada	%	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

		(Aplikasi SIMPADA)										
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blambangan Umpu, 05 Januari 2024



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**

Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700601 199702 1 005

**PENYERAHAN ANUGERAH INOVASI DAERAH
Dan ANUGERAH LHKPN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023**



ANUGERAH INOVASI PERANGKAT DAERAH PERINGKAT 2 DAN HARAPAN 3



ANUGERAH LHKPN PERINGKAT 3 TAHUN 2023

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2023
Realisasi Per 31 Desember 2023

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023		%
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pajak Hotel	24.196.000,00	22.000.000	23.809.490	108,22%
2	Pajak Restoran	2.161.534.859,20	1.700.000.000	2.171.527.134	127,74%
3	Pajak Reklame	240.328.209,00	225.000.000	206.629.845	91,84%
4	Pajak Penerangan Jalan	9.796.027.978,76	10.300.000.000	10.751.475.920	104,38%
5	Pajak Parkir	126.849.400,00	125.000.000	120.625.705	96,50%
6	Pajak Air Tanah	702.873.097,10	615.000.000	640.255.739	104,11%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	503.416.154,00	570.000.000	579.632.675	101,69%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	5.793.632.365,98	7.500.000.000	7.730.703.148	103,08%
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	368.368.032,00	700.000.000	651.038.002	93,01%
Jumlah		19.717.226.096,04	21.757.000.000	22.875.697.658	105,14%

Catatan :

Terdapat peningkatan Pendapatan sebesar 16% dari realisasi Tahun 2022

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar 105,14%



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197006011997021005

TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023
Realisasi Per 31 Desember 2023

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023		%
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Jasa Umum				
	- Retribusi Pelayanan Persampahan	155.111.000,00	209.646.400	191.245.000	91,22%
	- Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar	212.248.500,00	190.000.000	212.248.500	111,71%
	- Retribusi Tera Ulang Timbangan	24.558.000,00	25.000.000	25.010.000	100,04%
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	422.451.611,00	400.000.000	507.193.677	126,80%
2	Retribusi Jasa Usaha				
	- Retribusi Rusunawa	133.739.100,00	267.958.000	214.971.220	80,23%
	- Retribusi Penyewaan Lahan	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	100,00%
	- Retribusi Alat Mesin Pertanian (Traktor)	68.250.000,00	80.010.000	11.400.000	14,25%
	- Retribusi Penyewaan Alat	52.250.000,00	160.000.000	71.250.000	44,53%
	- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	185.973.000,00	262.892.700	261.775.500	99,58%
	- Retribusi Parkir	48.248.000,00	68.000.000	60.086.000	88,36%
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.000.000,00	7.000.000	2.500.000	35,71%
	- Retribusi Penjualan Bibit/Benih Ikan	17.585.000,00	20.000.000	20.000.000	100,00%
	- Retribusi Penjualan Air Bersih	45.417.750,00	55.000.000	46.959.500	85,38%
	- Retribusi Penjualan Air Bersih Rusunawa	7.760.000,00	12.000.000	13.040.150	108,67%
C	Retribusi Perizinan Tertentu				
	- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	928.557.236,43	520.000.000	749.718.123	144,18%
	Jumlah	2.318.149.197,43	2.287.507.100	2.397.397.670	104,80%



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197006011997021005